

European Union in Crisis : **Menguatnya Pandangan Berbasis Kedaulatan di dalam** **Krisis Ekonomi Uni Eropa**

Indra Kusumawardhana

*Program Studi S2 Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRAK

Krisis utang di zona Euro telah membawa babak baru pada penanganan krisis. Krisis ini kembali memunculkan wacana mengenai eksistensi mata uang tunggal Eropa. Krisis yang bermula dari Yunani ini telah membawa hampir seluruh negara Uni Eropa pada krisis dan resesi. Selain itu, tulang punggung ekonomi Eropa seperti Jerman, Perancis dan Italia juga terhambat oleh krisis. Di tengah-tengah pertumbuhan integrasi ekonomi regional di Uni Eropa, institusi regional tidak memiliki kemampuan untuk menanggulangi krisis. Argumen utama pada studi ini adalah bahwa krisis ekonomi negara-negara Uni Eropa belum terselesaikan. Di sisi lain, kondisi integrasi ekonomi Uni Eropa mengalami peningkatan dan terdapat pula benturan kepentingan nasional diantara negara anggota utama seperti Jerman, Perancis dan Inggris. Benturan berbasis kedaulatan mendorong pandangan yang dicetus oleh naiknya sentimen nasional dan membawa krisis ekonomi pada krisis politik dalam sejumlah negara anggota Uni Eropa.

Kata-Kata Kunci: *kedaulatan, kepentingan nasional, krisis ekonomi, integrasi regional, krisis politik*

The sovereign debt crisis that swept the Euro zone and in the process lead to a broader economic crisis in the region has became a new round for all the country that using Euro as their currency. The crisis that began from Greece has brought almost all the member of European Union into crisis and recession. Moreover, European economic backbone such as Germany, France and Italy were also hampered by this crisis. In the midst of growing regional economic integration of the European Union, the regional institution has not been able to resolve the crisis. The core argument of this study is the economic crisis in the countries of the European Union has not resolved yet despite the increasing conditions of economic integration of the European Union was due to the clash of national interests among the major member states such as Germany, France and Britain. This clash of sovereignty-based boost the outlook sparked by rising national sentiment and brought the economic crisis into a political crisis in a number of EU member states.

Keywords: *Sovereignty, national interest, economic crisis, regional integration, politic crisis*

Krisis utang yang melanda zona Eropa menjadi babak baru ekonomi negara-negara Eropa menuju resesi. Krisis ini pada perkembangannya melanda hampir seluruh negara-negara Eropa pengguna mata uang Euro. Krisis yang berawal dari kredit macet di Yunani yang kemudian berdampak luas bagi negara-negara Eropa lain (lihat Gambar 1.1. untuk detailnya). Negara-negara penyokong ekonomi Eropa seperti Jerman, Perancis dan Italia juga terkena imbas dari krisis tersebut. Euro kemudian tertekan dan mengakibatkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi negara-negara di zona Euro.

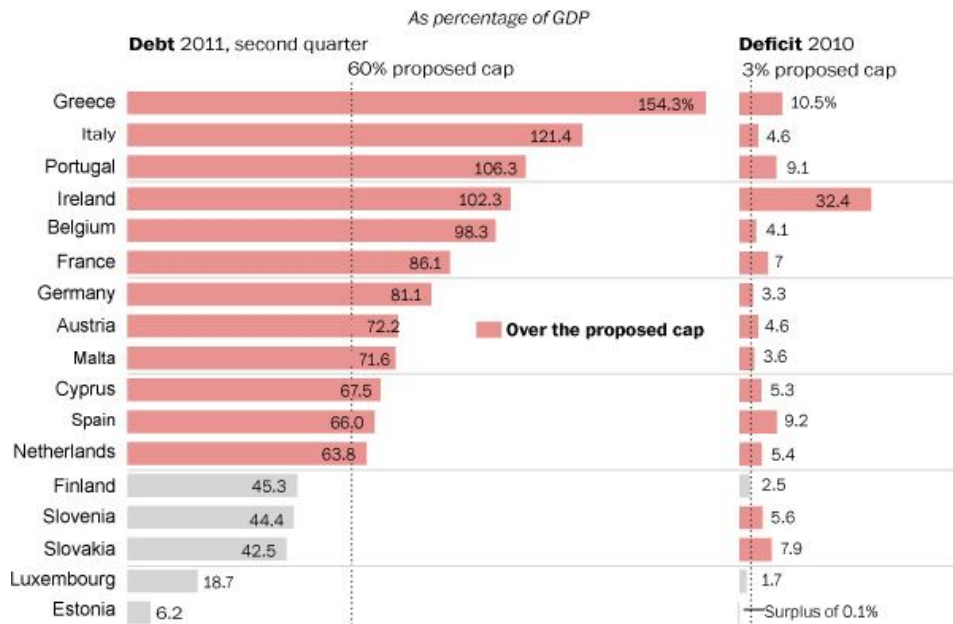
Sebelum krisis ekonomi ini terjadi, perjalanan sejarah Uni Eropa sebenarnya nyaris penuh dengan keberhasilan. Tahun 1995 hampir seluruh negara Eropa Barat bergabung. Tahun 1998 sistem keuangan Eropa terintegrasi dalam mata uang tunggal: *Euro*. Tahun 2004 bertambah lagi 10 negara anggota baru. Mereka adalah negara-negara ex-komunis Eropa Timur. Ini menjadikan Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi besar di dunia sekaligus menjadi contoh organisasi regional terbaik di dunia. Wajar saja kalau keberadaannya dikagumi oleh organisasi regional manapun di dunia. Bahkan pada tahun 2012 Uni Eropa mendapatkan hadiah nobel untuk perannya menyatukan benua biru tersebut (*Reuters* 2012). "*Ini adalah pesan bagi Eropa untuk melakukan segala sesuatu yang mereka bisa untuk mengamankan apa yang telah mereka capai dan terus maju,*" kata ketua komite Jagland, seperti dikutip dari *Reuters*, Jumat (12/10/2012).

Namun, optimisme terhadap Uni Eropa berbalik dan membuat harapan itu goyah dengan adanya krisis ekonomi yang mulai melanda Uni Eropa pada tahun 2008. Dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Krisis ekonomi tersebut telah membuat Uni Eropa mulai memasuki fase-fase sulit. Badai krisis yang dialami negara-negara Eropa memiliki 'efek domino' terhadap negara-negara Eropa lain (*Tempointeraktif* 2010). Jika dilihat kembali dari tahapan-tahapan integrasi menurut Ballasa (1963) Uni Eropa telah melewati berbagai tahapan hingga terciptanya EMU dan mata uang tunggal. Hal ini menandakan bahwa Eropa berada pada proses integrasi ekonomi yang terus meningkat, bahkan dengan dikeluarkannya perjanjian *Stability Growth Pact* (SGP)¹ pada 2003 dan

¹ Amy Verdun (2012) memberikan penjelasan mengenai SGP dalam bukunya *Ruling Europe The Politics of the Stability and Growth pact* yakni perjanjian yang terdiri dari peraturan – peraturan dengan tujuan membentuk sebuah rezim yang menjaga defisit anggaran tetap berada di tataran rendah (*low budgetary deficit*).

ditanda-tanganinya *Fiscal Compact* pada awal 2012, tahapan integrasi ekonomi ini sudah sepenuhnya terjadi .

Gambar 1.1 Hutang Negara-Negara Eropa dan Proposisinya terhadap GDP



Sumber : washingtonpost.com 2012

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah mengapa krisis ekonomi negara-negara di Uni Eropa tidak dapat diselesaikan ditengah kondisi integrasi ekonominya yang terus meningkat. Hipotesis yang diajukan adalah krisis ekonomi di negara-negara Uni Eropa tak kunjung terselesaikan ditengah kondisi integrasi ekonomi Uni Eropa yang terus meningkat disebabkan oleh benturan kepentingan nasional diantara negara-negara anggota utama seperti Jerman, Prancis dan Inggris. Benturan ini mendorong penguatan pandangan berbasis kedaulatan yang dipicu dengan meningkatnya sentimen nasional serta meluasnya krisis ekonomi menjadi krisis politik di sejumlah negara anggota Uni Eropa.

Problematika Uni Eropa di Dalam Krisis Ekonomi

Secara umum terdapat sejumlah pandangan yang telah berusaha menangkap signifikansi fenomena yang terjadi di Eropa. Pandangan pertama bertumpu pada pendekatan yang melihat bahwa krisis finansial yang belum terselesaikan hingga saat ini disebabkan oleh keterlambatan penanganannya. Lynn (2011) dalam buku *“BUST Greece, the Euro, and the Sovereign Debt Crisis”* menuliskan bahwa belum terselesaikannya krisis di zona Eropa dikarenakan terlambatnya para petinggi-petinggi di zona Eropa dalam menyadari kondisi keuangan Yunani yang sudah tidak mampu membayar jatuh tempo utangnya. Hal lain adalah keengganan negara-negara dengan perekonomian kuat seperti Jerman untuk menolong Yunani pada awal krisis utang ini terjadi. Ketika krisis meletus pada tahun 2008, kondisi Yunani sudah demikian parah sehingga menyebabkan kepanikan terhadap pasar. Hal ini sebagaimana ditulis Lynn (2011):

“The Euro-zone’s leaders had ignored the crisis brewing in Greece for year after year. When it broke into the open, they tried to pretend it wasn’t their problem, then blamed everyone else, and once it threatened to overwhelm them, allowed themselves to be rushed into a solution, while it may fixed the immediate crisis, was only storing up even worse problems a little further down the road”.

Kelalaian ini menandakan dua hal. Pertama, bahwa peraturan berlandaskan perjanjian *Stability and Growth* pada 2003 telah gagal mengawasi perilaku negara – negara anggota Uni Eropa dan gagal dalam menerapkan sanksi. Minimnya pengawasan pada akhirnya menghasilkan tingginya utang Yunani dan Italia pada awal krisis ini terjadi. Kedua, tidak adanya solidaritas negara-negara anggota Uni Eropa diawal krisis ini terjadi. Sehingga Uni Eropa dianggap tidak mempunyai legitimasi yang mumpuni untuk mengawasi negara-negara anggotanya. Hal ini diperparah dengan pada waktu krisis terjadi tidak adanya mekanisme dalam penanganan krisis ekonomi yang terjadi untuk menyelamatkan negara-negara di zona Eropa, sehingga krisis ini menyerang Eropa secara tiba-tiba tanpa ada petunjuk bagaimana mengatasinya (Darvas 2012).

Pandangan kedua tentang penyebab terus memburuknya perekonomian negara-negara Eropa diberikan oleh Krugmann (2011) yakni hilangnya kemampuan negara untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat dalam masa krisis sehingga negara-negara seperti Yunani terjebak dalam krisis ekonomi. Negara-negara yang

bergabung dalam zona Eropa kehilangan kendali untuk menghadapi keadaan di luar perkiraan mereka. Semestinya sebuah negara mampu melakukan pencegahan sebelum krisis ekonomi muncul. Hal inilah yang kurang dari sebuah integrasi di zona Eropa (Krugmann 2011). Seperti yang dikatakan Krugmann (2012) dalam wawancaranya dengan Europepress *"I think that the euro was a romantic idea, and a fine symbol of political unity. But when you give up your national currency, you lose a lot of flexibility, and it is not easy to compensate for the loss of room for manoeuvre"*. Dengan indikator – indikator ekonomi Krugmann (2012) menunjukkan bahwa kekurangan dari integrasi Eropa adalah tidak adanya integrasi fiskal dan hilangnya keluwesan negara dalam kebijakan ekonomi, dikarenakan adanya sistem mata uang tunggal.

Pendapat mengenai kurangnya kompetensi fiskal di zona Eropa sehingga menyebabkan krisis yang terjadi sulit diselesaikan selaras dengan pendapat De Grauwe (2009) bahwa keengganan negara – negara anggota menyerahkan kompetensi nasional dalam hal kebijakan fiskal mengimplikasikan bahwa zona Eropa dikonstruksi diatas sebuah kesatuan moneter namun keputusan-keputusan ekonomi dan fiskal masih berada ditataran nasional seperti yang ditulis dalam bukunya *"Economics of Monetary Union"* bahwa *"The Euro Area is thus different from other unions, which have a fiscal federal structure, in that fiscal competence remain largely at national level"* (De Grauwe 2009). Pernyataan De Grauwe (2009) ini dikutip dari tulisan Catania (2011) berjudul *"Preventing another Euro Area Crisis: EU Economic Governance 'Six Pack' – a case of too little, too late?"*. Di dalam tulisan ini, Catania (2011) menjelaskan lebih dalam mengenai kesalahan Uni Eropa dengan tidak menghiraukan kebijakan fiskal kawasan. Dikarenakan kurangnya keselarasan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan fiskal, perekonomian dikawasan itu cenderung mengalami dua konflik yakni keinginan untuk menjaga fleksibilitas kebijakan nasional, sedangkan pada saat yang bersamaan kebutuhan untuk menjaga koordinasi dan kedisiplinan fiskal kawasan.

"Due to the lack of common economic and fiscal policies, since the inception of EMU, there have been two conflicting objectives – the desire to retain flexibility in national policies whilst at the same time the need to maintain coordination and fiscal discipline given that, as the current crisis has clearly shown, the economic policies of one member state can have the negative spillover repercussions on the others" (Catania 2011).

Pandangan ketiga, berpendapat bahwa krisis ini sulit untuk diselesaikan dikarenakan integrasi ekonomi dan politik di Uni Eropa sangat

tergantung dari kerja sama antara Jerman dan Prancis sebagai dua negara kuat di Uni Eropa. Seperti yang ditulis oleh Glomb (2011), *"Without an agreement between France and Germany, nothing happens in Europe. At the same time, this Franco – German bilateralism invites endless criticism for promoting a "Franco-German diktat" which is more harmful than beneficial to the European project."* Pendapat ini telah terbukti dengan gagalnya perjanjian konstitusi Eropa di Roma pada 29 Oktober 2004 dikarenakan Perancis melakukan referendum berkaitan dalam masalah ini akhirnya konstitusi Eropa pun tidak terwujud (*Tempo* 2005).

Dari elaborasi pustaka yang telah dilakukan diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan para akademisi dan praktisi melihat krisis ini dari sisi ekonomi, sedangkan belum banyak studi mengenai krisis ekonomi kawasan ini yang melihat dari sudut pandang kedaulatan dan kepentingan nasional di dalam integrasi regional yang sedang dihadapkan dengan krisis ekonomi. Pada titik inilah, penelitian ini melihat adanya celah yang dapat dijadikan pintu masuk dalam melihat fenomena krisis Eropa ditengah integrasinya yang mapan. Yakni, krisis ekonomi di zona Eropa sulit untuk diselesaikan karena pada dasarnya Uni Eropa merupakan sebuah integrasi regional yang berangkat dari integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi hanya bisa terjadi jika didasarkan pada kondisi-kondisi saling menguntungkan. Sedangkan krisis ekonomi negara-negara di Uni Eropa tidak dapat diselesaikan ditengah kondisi integrasi ekonominya yang terus meningkat justru disebabkan oleh benturan kepentingan nasional diantara negara-negara utama di Uni Eropa seperti Jerman, Prancis dan Inggris yang mendorong pandangan berbasis kedaulatan yang dipicu oleh menguatnya sentimen nasional dan meluasnya krisis ekonomi menjadi krisis politik sehingga makin sulit menyatukan posisi dalam menghadapi krisis secara regional.

Pada kenyataannya perjalanan dari integrasi ini telah menjadi sebuah diskursus yang menjadi ketertarikan berbagai ahli baik dari akademisi maupun praktisi (Corbey 1993, 1995; Haas 1976; Hoffman 1996; Milward 1992; Moravscik 1991, 1998; Taylor 1983). Para *intergovernmentalist* lebih fokus pada peran pemerintah nasional negara - negara anggota dalam melindungi kepentingan nasionalnya masing – masing. Mereka kebanyakan mempertahankan posisi mereka bahwa pemerintah nasional tidak kehilangan *power* dalam proses integrasi ini. Pemerintah nasional berpartisipasi dalam proses integrasi Eropa hanya untuk menjaga kepentingan nasional mereka masing– masing. Menurut beberapa yang mendukung aliran ini bahkan ada beberapa negara

anggota yang bertindak lebih jauh dengan menggunakan proses integrasi untuk memperkuat pengaruhnya (*power*) *vis-à-vis* dengan aktor-aktor politik domestik-proses ini dianggap akan saling mempengaruhi dan melibatkan interaksi antara domestik-internasional (Dyson 1994; Moravcsik 1993a; Putnam 1988; Wolf & Zangl 1996).

Perkembangan yang terjadi di kawasan Eropa ketika terjadi krisis ekonomi seperti semakin menegaskan pendapat kaum *intergovernmentalist* bahwa sesungguhnya arah kebijakan Uni Eropa merupakan hasil dari proses negosiasi *intergovernmental* yang dilakukan oleh negara-negara anggotanya. Integrasi negara-negara Eropa merupakan fenomena perluasan realisme politik *beyond the borders of sovereign nation state* (Eising & Koch t.t., 18). Uni Eropa juga unik karena sistem ini tidak akan menisbatkan dan menggantikan peran *nation-state* (Eising & Koch t.t., 18).

Pemikiran Robert Keohane pada tahun 1980-an mengkulminasi apa yang dia sebut sebagai 'institusionalisme neo-liberal'. Asumsi dari Keohane adalah "*State action depends to a considerable degree on prevailing institutional arrangement*" (Keohane 1989, 2). Pada tahun 1990 dan 1991 Keohane dan Hoffmann kembali berkontribusi terhadap perdebatan mengenai integrasi Eropa dengan memaksakan argumen mereka bahwa perubahan institusi di dalam *European Community* hanya dapat dipahami jika menerima '*Competing Hypotheses*'. Mereka menerima mekanisme *spill over*, namun menyatakan bahwa mekanisme ini akan mengarah pada integrasi yang sukses hanya jika dibawah beberapa kondisi salah satunya adalah jika ada kemungkinan untuk menyatukan kepentingan-kepentingan nasional (terutama Jerman, Perancis dan Inggris).

Walaupun pendapat mereka tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang mereka maksud dengan *spill over*. Berkaitan dengan integrasi moneter mereka menyatakan: "*Nothing in the functional logic of spill over requires a European Central Bank or single currency*" (Keohane & Hoffmann 1991, 26) Alasan mereka berangkat dari asumsi bahwa tarik menarik antar kepentingan pemerintah negara – negara anggota akan mencegah *spill over* (Keohane & Hoffmann 1991, 26). Pendapat diatas dapat menjadi dasar untuk melihat apa yang terjadi di zona Eropa sekarang merupakan kuatnya eksistensi negara didalam integrasi ekonomi. Pertama, adanya krisis ekonomi kawasan membuat negara – negara anggota Uni Eropa merasa terancam sehingga kembali ke kepentingan mereka masing-masing. Kedua adalah sentimen nasional berkaitan

dengan kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang pada kenyataannya malah membawa zona Eropa kedalam resesi ekonomi. Kedua elemen itu menjadi pintu masuk dalam melihat apa yang terjadi di Uni Eropa saat ini.

Hoffmann (1966) telah menekankan bahwa negara-bangsa akan tetap menjadi unit logika yang paling kuat dalam sistem internasional dikarenakan oleh tiga alasan, dia memberikan label tiga alasan ini yakni '*national consciousness*', '*national situation*' dan '*nationalism*'. Label yang terakhir mengacu pada doktrin nasional atau ideologi (Hoffmann 1966, 867–868). Dia mengkritik neo-fungsionalisme dan menekankan bahwa integrasi akan mengalami hambatan ketika itu terjadi di *high politics*. Pada tahun 1980-an pendapat ini telah mendapat dukungan dari *Euroscelerosis* dan *Europessimism*². Para *intergorvermentalists* menekankan pendapatnya bahwa percaya akan hilangnya negara-bangsa dikarenakan bergabung dengan *European Community* yang sekarang menjadi Uni Eropa yang semakin besar adalah sebuah ilusi (Hoffmann 1982; Taylor 1983).

Negara dianggap sebagai aktor yang rasional.³ Pilihan-pilihan yang diambil oleh negara ditentukan oleh evaluasi dan analisa dari

² *Euroscelerosis* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dimana tingkat pengangguran tinggi dan rendahnya tingkat mobilitas tenaga kerja di Eropa. Sedangkan *Europessimism* Taggart (1998) memberikan definisi yang jelas mengenai istilah ini yaitu "*Euro-skepticism/Euro-pessimism expresses the idea of contingent or qualified opposition, as well as incorporating outright and unqualified opposition to the process of European integration*" (Taggart 1998, 366). Lebih lanjut dia memberikan penjelasan alasan mereka yang pesimis terhadap integrasi eropa yaitu: anti – integrasi dikarenakan tidak sependapat dengan ide tentang Uni Eropa "*those that are not in principle opposed to European integration but are skeptical that the EU is the best form of integration because it is too inclusive*" serta mereka yang secara general tidak berlawanan dengan ide tentang Uni Eropa namun "*but are skeptical that the EU is the best form of integration because it is too exclusive*" (Taggart 1998, 365-366). Posisi ini digawangi oleh orang – orang yang secara general melawan Uni Eropa sebagai sebuah bentuk pemerintahan.

³ Asumsi ini berangkat dari pendapat bahwa pilihan – pilihan yang diambil oleh negara yang menjadi bagian dari integrasi merupakan sebuah konsekuensi dari tekanan domestik negara tersebut. Moravcsik mendasari asumsinya bahwa negara adalah aktor yang rasional dengan menghubungkan dua teori hubungan internasional dalam kerangka pemikirannya yakni: *a theory of national preference formation* dan *a theory of*

keuntungan dan kerugian yang diakibatkan dari interdependensi ekonomi (Moravcsik 1993b, 480; Verdun 2000, 30). Dengan begitu hasil dari proses tawar-menawar ini ditentukan oleh relativitas kekuatan negara-bangsa yang terlibat dalam proses ini. Walaupun hasil dari integrasi Eropa ditentukan oleh peran pemerintah-pemerintah nasional, kemungkinan akan pengaruh kekuatan domestik termasuk kekuatan masyarakat memainkan peran yang signifikan yang tidak dapat dilupakan begitu saja (Moravcsik 1993b, 487–495).

Pendekatan *Intergovernmentalist* memberikan sebuah sudut pandang yang bagus bagaimana mekanisme tawar-menawar yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan di tataran Uni Eropa dalam upaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda kawasan cenderung mempunyai ketergantungan terhadap perilaku ataupun kondisi negara-negara besar yang menjadi anggota Uni Eropa (Jerman, Prancis, Inggris). Negara-negara kecil lainnya seperti negara yang berada di selatan merasa sangat tertekan dengan kecenderungan seperti ini. Serta, betapa hasil pemilihan umum nasional negara-negara kunci dalam Uni Eropa mempunyai pengaruh yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kekhawatiran akan kerja sama antara Jerman dan Prancis setelah Franc Hollande terpilih menjadi presiden Prancis tahun lalu.

Krisis ekonomi Eropa memberikan sebuah contoh empiris yang telah diramalkan banyak pemikir *intergovernmentalist* bahwa ditengah kondisi integrasi yang mapan seperti Uni Eropa, kedaulatan negara tetap menjadi sebuah konsep yang mempengaruhi penyelesaian krisis Eropa. Terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Uni Eropa yang berawal dari Yunani ini semakin memperlihatkan bahwa pendapat *intergovernmentalist* bahwa integrasi yang terjadi dengan adanya Uni Eropa semakin memperkuat eksistensi para pemimpin politik dalam memperebutkan *power*. Juga memperlihatkan tujuan mempertahankan kepentingan nasional negaranya *vis-à-vis* aktor-aktor politik domestik mereka masing-masing (Dyson 1994; Moravcsik 1993; Putnam 1998; Wolf & Zangl 1996).

interstate strategic interactions (Moravcsik 1993b: 482; mengenai EMS lihat Moravcsik 1998a and 1998b).

Cerita Sukses Eropa : *First as a role model, then as a tragedy*

Kecenderungan peningkatan proses integrasi dan keuangan regional yang terjadi di Eropa pada dasarnya dilandasi oleh konsep dasar bahwa manfaat yang akan diperoleh dengan adanya proses integrasi tersebut lebih besar dengan resiko yang mungkin dihadapi oleh masing-masing negara anggota dalam kawasan. Salah satu teori yang menjadi dasar integrasi ekonomi dan moneter regional adalah teori-teori *Optimum Currency Area* (OCA) yang digagas oleh Mundell pada tahun 1961 (Mundell 1961). Didukung oleh Bella Ballasa (1961), Krugmann dan Obstfeld (2000), serta Forbes & Chinn (2003).

Ada tiga proses transisi utama yang ditempuh Eropa untuk menuju EMU. Pada tahap pertama, yaitu Juli 1990–Desember 1993, arus transaksi neraca modal (*capital account*) dan jasa keuangan dibebaskan secara substantial dalam kawasan negara Masyarakat Eropa. Pada tahap kedua, yaitu Januari 1994–Desember 1998), *The European Monetary institute* (EMI) dibentuk sebagai embrio bagi pembentukan sebuah bank bersama di Eropa. EMI berfungsi untuk memperkuat kerja sama antar negara dan bank sentral, melakukan koordinasi kebijakan moneter dan mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk membentuk suatu *European Central Bank System* (ECBS). Pada saat yang sama, berdasarkan *Maastricht Treaty*, beberapa indikator divergen konvergensi nominal mulai diberlakukan, yaitu laju inflasi, suku bunga jangka pendek, defisit anggaran, dan pinjaman pemerintah, pada tahap ketiga, (yaitu mulai Januari 1999). Sebelas negara anggota masyarakat Eropa bergerak menuju penggunaan mata uang tunggal, *Euro* dan penggunaan sebuah central bank bersama yaitu *European Central Bank* (ECB).

Setiap upaya Uni Eropa dalam menyelesaikan krisis yang terjadi harus melalui proses negosiasi negara-negara anggota. Hal ini karena sifat Uni Eropa yang *intergorvermental*. Dalam hal ini negara-negara besar seperti Jerman, Prancis dan Inggris mempunyai posisinya masing-masing. Bahkan Yunani sebagai negara yang dalam kondisi kritis menunjukkan sikap tidak patuhnya terhadap otoritas Uni Eropa dengan memunculkan agenda referendum mengenai persetujuan menerima dana talangan dari ESFS (Reuters 2011). Krisis di Zona Eropa menunjukkan sebuah realitas dari kelemahan integrasi ekonomi seperti Uni Eropa bahwa negara-negara yang mempunyai *power* kuat seperti Jerman atau Prancis mengalami sebuah kondisi yang berbeda. Hal ini terlihat dari pengaruh mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berimplikasi kawasan.

Walaupun pada kenyataannya kebijakan ini malah membawa Eropa ke dalam resesi ekonomi dan memicu berbagai kerusuhan sosial di Eropa. Bahkan kebijakan tersebut memantik komentar dari veteran finansial yakni George Soros bahwasanya pemaksaan Jerman tentang masalah *fiscal discipline* dapat menciptakan sebuah ketegangan yang tinggi diseluruh Eropa dan hal ini menyebabkan adanya kemungkinan hancurnya Uni Eropa (Soros 2012). Sulitnya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam upaya mengatasi krisis yang menyerang kawasan Eropa membuat kemapanan struktur Uni Eropa yang sudah melalui berbagai perubahan dan tahapan integrasi menjadi tidak bekerja semestinya. Muncul berbagai kontradiksi kepentingan nasional dalam mencapai keputusan untuk kepentingan kawasan. Cerita sukses Uni Eropa menjadi sebuah kisah sukses di masa lalu, banyak kalangan yang akhirnya meragukan bahwa Uni Eropa dapat mengatasi krisis ini. Bahkan ada beberapa yang mempertanyakan akan kemungkinan Uni Eropa akan bubar. *First as a role model, then as a tragedy. Why?!*

Dari Krisis Ekonomi Menuju Krisis Politik

Sejak pertama kali munculnya gagasan mata uang bersama '*a common currency*', para penggagas teori-teori integrasi ekonomi kawasan, seperti Mundell (1961)⁴ sebagai pionier dari gagasan mata uang tunggal ini, sangat percaya akan masa depan pembentukan mata uang Euro. Mundell (1961) berargumen bahwa dengan adanya pergerakan barang dan modal secara bebas suatu saat akan menyatukan politik Eropa dan zona Eropa akan berevolusi menjadi sebuah kawasan dengan mata uang tunggal yang natural. Namun jika melihat fenomena kekinian dimana Uni Eropa sekarang menghadapi krisis terparahnya didalam sejarah, para penggagas teori-teori integrasi Eropa harus menganggap diri mereka seorang utopis. Karena hasil dari buah pikirannya telah secara brutal menghancurkan ekonomi negara-negara pengguna mata uang Euro dan mengakui bahwa krisis yang terjadi merupakan sebuah penegasan akan superioritas politik diatas ekonomi.

⁴ Dinyatakan oleh ahli ekonomi Mundell pada tahun 1961, dalam teori "*optimal currency area*" yang melihat kemungkinan suatu kawasan dapat memaksimalkan efisiensi ekonomi dengan menggunakan mata uang yang sama.

Integrasi ekonomi hanya akan berkontribusi pada integrasi politik jika integrasi ekonomi tersebut sukses dan memberikan keuntungan keseluruhan anggota-anggota integrasi. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka integrasi tersebut hanya menimbulkan krisis politik yang menurut Friedman (2011) dikarenakan berbagai pemerintahan nasional yang berbeda menjadi subjek dari tekanan politik yang berbeda-beda dan akhirnya menciptakan sebuah konflik politik. Sekarang, integrasi ekonomi yang mereka serukan itu diibaratkan sebuah kendaraan penghancur yang menggilas negara-negara anggotanya. Kenyataan ini menegaskan pandangan para ahli ekonomi yang sejak awal telah skeptis mengenai Integrasi Eropa.

The political goal of creating a harmonious Europe has also failed. France and Germany have dictated painful austerity measures in Greece and Italy as a condition of their financial help, and Paris and Berlin have clashed over the role of the European Central Bank and over how the burden of financial assistance will be shared (Feldstein 2011).

Sejauh ini telah banyak sekali mekanisme solutif berhasil dilakukan, namun gagal mencapai sasaran penyelesaian dan justru menyisakan banyak 'tugas rumah' bagi Uni Eropa. Dampak krisis Eropa langsung dirasakan oleh negara zona euro, karena bagi mereka krisis ini memunculkan instabilitas sistem moneter negara, mengingat kebijakan kawasan zona euro berdampak langsung pada *landscape* domestik negara anggota (Winarno 2011, 98). Karena keputusan dan ketentuan yang diambil ditataran regional harus diimplementasikan oleh pemerintah-pemerintah nasional anggota Uni Eropa, terutama negara-negara yang berada dalam posisi terlilit utang dan mengharapakan dana talangan dari Uni Eropa (Yunani, Italia, Spanyol, Irlandia dan Portugal).

Munculnya kewajiban penghematan besar, seperti pemotongan berbagai macam tunjangan kesejahteraan. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa konsep *Welfare State* yang dipopulerkan negara Eropa menjanjikan begitu melimpahnya jaminan sosial yang mahal, akhirnya justru memanjakan banyak masyarakat Eropa dengan segala kemudahan, sehingga ketika ada satu ide penghematan (*austerity*) ditawarkan, masyarakat menjadi reaktif untuk menolak. Reaksi masyarakat ini menunjukkan menguatnya sentimen nasional terhadap kebijakan-kebijakan Uni Eropa, hal ini terlihat dari banyak demo yang terjadi akibat cetusan gagasan penghematan. Tekanan dari dalam negeri dan Uni Eropa membuat para pemimpin negara di zona Eropa mengalami pilihan-pilihan politis yang sulit untuk menyelamatkan

negara mereka masing-masing dari himpitan krisis ekonomi yang mengancam. Sehingga akhirnya memakan korban politik dengan mundurnya Perdana Menteri Yunani George Papanderou dan perdana menteri Italia Silvio Berlusconi (*NYTimes* 2011).

Kejadian ini seperti memberi pesan keseluruh negara-negara zona Eropa dan bahkan dunia bahwa krisis ekonomi ini telah melampaui dimensi ekonomi semata namun sudah merembet ke dimensi politik dan hal ini berkaitan dengan masalah kedaulatan dan kepentingan nasional.! Faktor mayor dan minor, semuanya berkolaborasi menciptakan suatu krisis yang seakan mustahil diselesaikan dalam waktu yang singkat. Seperti yang dinyatakan oleh Fischer (2012) bahwa *"Indeed, Europe's crisis only seems to be economic or financial in nature; in reality, it is political to the core, for it has revealed that Europe lacks two things: a political framework-that is, more statehood – for its monetary union, and the vision and leadership to create it"*⁵. Lebih lanjut Fischer menyatakan bahwa krisis politik ini akan memberikan sebuah momentum terhadap menguatnya sentimen nasional yang sempit.

Pengaruh pemilu Nasional di Eropa

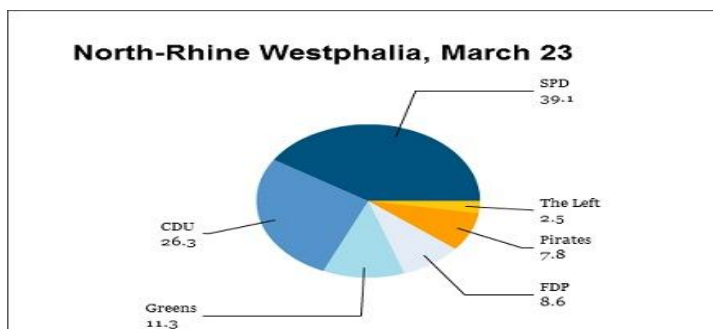
Krisis ekonomi yang terjadi di zona Eropa merupakan sebuah krisis yang unik, dikarenakan integrasi ekonomi regional mengharuskan krisis ekonomi ini ditangani di dalam kerangka penyelesaian regional. Karena itu, negara anggota ditempatkan sebagai aktor yang memainkan peran penting dalam regionalisme ini. Huelshoff (1994) menjelaskan bahwa untuk memahami pilihan-pilihan dari sebuah negara, diharuskan melihat dan memahami dinamika internal dari negara tersebut dan memperhatikan signifikasi dari konteks politik domestik. Berdasarkan pendekatan tersebut keterlibatan aktor negara dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berimplikasi kawasan, dinamika

⁵ Didalam artikel berjudul *'Europe's new year irresolution'* Fischer (2012) menyatakan bahwa meskipun aktor – aktor penting Uni Eropa telah menyatakan bahwa mereka telah bersatu dalam mengatasi krisis ini namun pada kenyataannya pandangan sempit berbasis nasional telah mendapatkan momentumnya untuk bangkit kembali. Lebih jauh mengenai pembahasan ini dapat di baca di <http://www.projectsyndicate.org/commentary/europe-s-worsening-crisis-in-2013-by-joschka-fischer> diakses pada tanggal 6 Januari 2013.

nasional dan pendapat rakyat negara-negara anggota mengenai Uni Eropa perlu diketahui.

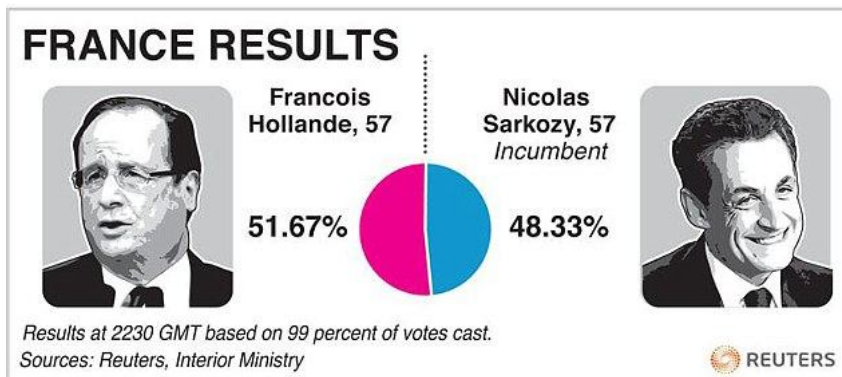
Hingga September 2012, empat negara Eropa telah memilih pemimpin baru dan partai pemenang di negara mereka. Secara logis hal ini akan berpengaruh pada *Austerity Policy* sebagai kebijakan penyelamatan ekonomi Eropa yang diusung oleh Jerman sebagai pendukungnya. Empat Negara Eropa yang telah menyelesaikan pesta民主asinya hingga Bulan September 2012 adalah Prancis, Jerman, Yunani dan Belanda. Hasilnya adalah rakyat Prancis memilih Francois Hollande yang datang dari partai sosialis. Hollande mengalahkan *incumbent* Nicolas Sarkozy dari partai *Union for Popular Movement* yang beraliran tengah-kanan. Di Jerman, pemilihan umum di wilayah North Rhine-Westphalia (NRW), wilayah terbesar di Jerman menunjukkan kekalahan Partai Kristen Demokrat, partai tengah-kanan yang mengusung Kanselir Jerman, Angela Merkel. Pemilu tidak langsung yang memang dilaksanakan 18 bulan sebelum pemilu nasional tersebut, menjadi sangat penting karena hasil pemilu di wilayah ini dapat mempengaruhi politik Nasional.

Gambar 4.1



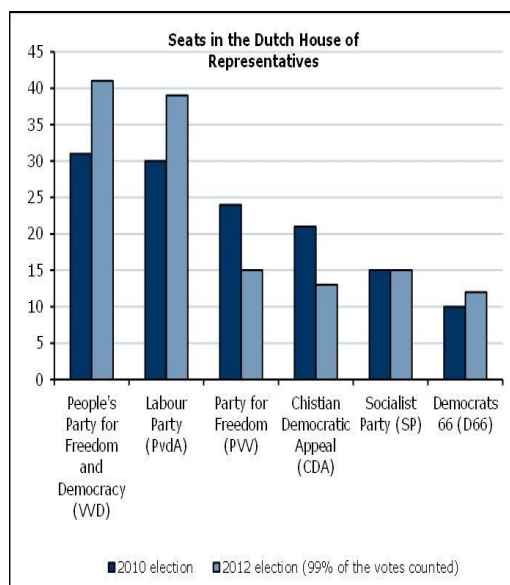
Sumber: suffragio.org 2012

Gambar 4.2

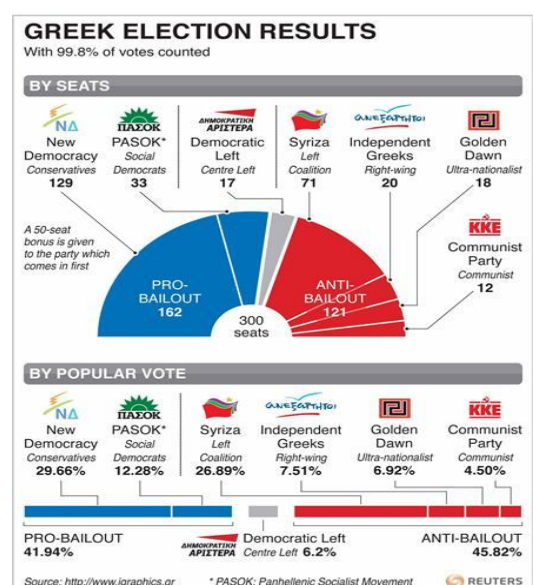


Sumber: dailymail.co.uk 2012

Gambar 4.3⁶



Gambar 4.4⁷



Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh pemilu yang diselenggarakan di Belanda dan Yunani, pemilih di Belanda memilih partai VVD berhalauan 'tengah-kanan' sebagai pemenang, sementara *Freedom Party*

⁶ Sumber: research.nordeamarkets.com 2012.

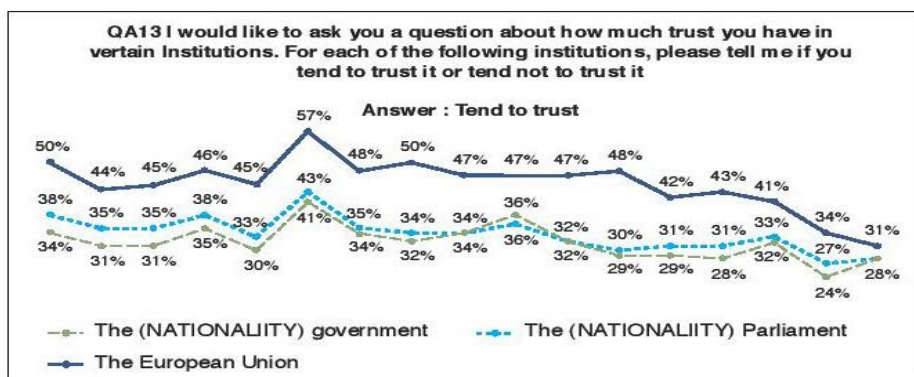
⁷ Sumber: blog.thomsonreuters.com 2012

(radikal kanan) yang digawangi oleh Geert Wilders dengan kampanye anti-imigran dan anti Islam mengalami kekalahan. Sementara di Yunani partai yang mendukung kebijakan *bail out* memenangkan pemilu negara ini. Kemenangan dan kekalahan partai berhalauan ‘tengah-kanan’ di empat negara anggota Uni Eropa mempunyai pengaruh yang besar terhadap kebijakan *Austerity policy*. Kebijakan pemulihan ekonomi ini dilakukan dengan mengurangi *deficit budget* melalui upaya pemotongan budget kesejahteraan sosial yang dianggap ‘tidak produktif’. Beberapa kebijakan kesejahteraan sosial yang dikorbankan misalnya pengurangan pengeluaran pada pelayanan public hingga kebijakan pengurangan jaminan sosial bagi kelompok tak mampu yang selama ini bergantung pada uang jaminan ini.

Austerity Policy dipercaya oleh Jerman dan Prancis (pada kepemimpinan Sarkozy) mampu mengatasi krisis ekonomi Eropa. Namun, kekalahan keduanya menunjukkan akan adanya penolakan rakyat terhadap kebijakan ini. Di sisi lain, kemenangan di Belanda dan Yunani mengindikasikan kebijakan pengurangan defisit ini masi didukung. Kedepannya, perdebatan antara upaya penyelesaian krisis ala ‘Paris’ yg menolak kebijakan ini atau ala ‘Berlin’ yang mendukung *Austerity Policy* akan mewarnai upaya negara-negara anggota Uni Eropa dalam menentukan paket perbaikan ekonomi di negaranya. Terjadinya krisis ekonomi ini akhirnya semakin membuat rakyat negara-negara anggota Uni Eropa kehilangan kepercayaan terhadap institusi ini.

Gambar 4.6

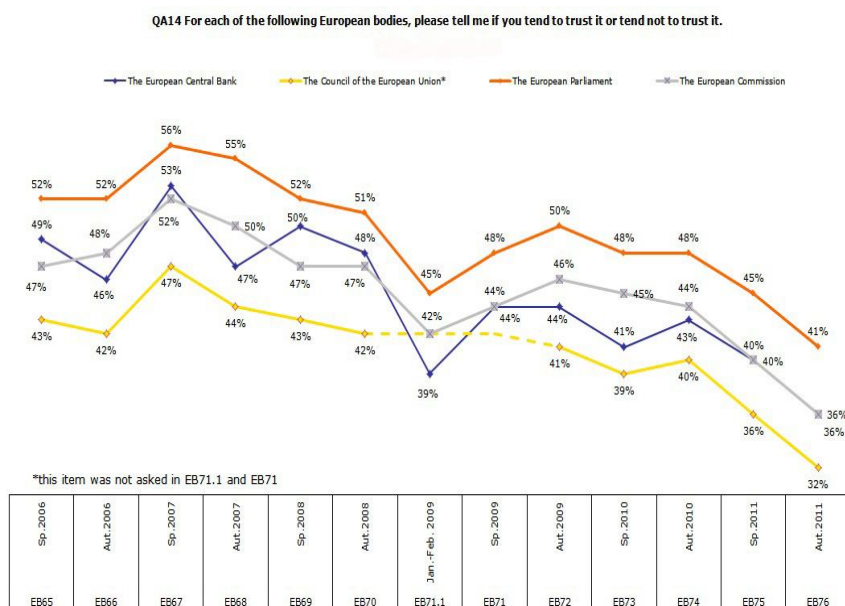
Figure 11: Trust in National Governments, Parliaments and in the European Union, 2006-2012



Sumber: *European Commission* 2012

Dari data jajak pendapat di atas yang dilakukan oleh *European Commision* dapat dilihat bahwa meskipun secara general publik masih cenderung percaya terhadap Uni Eropa maupun pemerintahan nasional mereka. Tetapi jika diamati lebih cermat dapat dilihat bahwa ditahun 2006–2012 kepercayaan publik terhadap Uni Eropa terus mengalami penurunan dari 57% menjadi berada di titik terendahnya 31%. Sedangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah nasional meskipun fluktuatif dengan angkat tertinggi berada di 43% dan terendah 24% namun diakhir tahun mengalami kenaikan menjadi 28%. Jarak antara kepercayaan publik terhadap nasional dan Uni Eropa semakin sempit. Hal ini sudah tentu dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi, dan rakyat negara-negara anggota semakin tidak percaya dan merasa tidak terwadahi kepentingannya di Uni Eropa.

Gambar 4.7



Sumber: *European Commission* 2012

Menurut data yang menyorot pendapat masyarakat Uni Eropa terhadap institusi-institusi Uni Eropa yaitu *European Central Bank*, *Council of the European Union*, *European Parleмент* dan *European Commision*. Keempat institusi tersebut mengalami penurunan kepercayaan yang signifikan antara tahun 2008–2011. Komisi Eropa menjadi institusi yang mengalami penurunan paling tajam dari 52% di 2007 menjadi 36% di

2011 (-16%), hal ini dikarenakan komisi Eropa adalah dikarenakan komisi Eropa adalah institusi yang mengawasi implementasi regulasi-regulasi Uni Eropa, hal ini berarti komisi Eropa adalah wajah dari supranasional Uni Eropa dan yang menjadi manifestasi Uni Eropa dalam mengintervensi kedaulatan negara-negara anggotanya.

Sedangkan komisi Eropa bukanlah institusi yang anggotanya dipilih secara langsung seperti parlemen Eropa atau layaknya dewan Eropa yang anggotanya adalah menteri-menteri perwakilan dari negara-negara anggota yang jabatannya dipilih langsung melalui pemilihan nasional. Anggota-anggota komisi Eropa dipilih langsung oleh pemerintahan nasional sehingga tidak ada partisipasi dari rakyat dalam pemilihannya (Wilken 2012). Sedangkan ECB sebagai institusi yang pada masa krisis ekonomi ini menjadi institusi yang paling disorot mengenai perannya di dalam krisis menjadi institusi yang paling fluktuatif dalam hal kepercayaan masyarakat. Dari berbagai pembahasan diatas dapat dilihat bahwa sentimen rakyat negara-negara anggota Uni Eropa semakin meningkat sejak terjadinya krisis ekonomi yang terjadi. Tekanan-tekanan dari dalam negeri ini semakin membuat negara-negara utama Uni Eropa sebagai negara yang mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi arah kebijakan Uni Eropa memperkuat eksistensinya demi kepentingan nasionalnya masing-masing.

Kesimpulan

Krisis ekonomi negara-negara di Uni Eropa tidak dapat diselesaikan ditengah kondisi integrasi ekonominya yang terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh benturan kepentingan nasional diantara negara-negara utama Uni Eropa seperti Jerman, Prancis dan Inggris, yang mendorong pandangan berbasis kedaulatan. Juga dipicu oleh menguatnya sentimen nasional dan meluasnya krisis ekonomi menjadi krisis politik sehingga makin sulit menyatukan posisi dalam menghadapi krisis secara regional. Benturan kepentingan ini terjadi dikarenakan oleh integrasi regional yang telah melewati berbagai tahapan integrasi ekonomi hingga munculnya Uni Eropa dan Euro sebagai mata uang tunggal. Krisis ekonomi yang menimpa negara-negara anggota Uni Eropa ini harus ditangani dalam kerangka regional.

Mekanisme ini memunculkan kebijakan, keputusan dan perjanjian dalam upaya menangani krisis ekonomi yang terjadi. Sedangkan

kebijakan-kebijakan Uni Eropa telah memantik sebuah kondisi yang tidak menguntungkan bagi negara anggotanya. Rakyat negara-negara anggota Uni Eropa semakin reaktif dan pesimis terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Pemerintah nasional negara-negara anggota Uni Eropa pun semakin kesulitan dalam mengambil posisi di dalam krisis yang terjadi. Akhirnya negara-negara besar di Uni Eropa (Jerman, Inggris dan Prancis) memperkuat eksistensinya di tataran regional demi kepentingan nasionalnya masing-masing. Sehingga Integrasi ekonomi yang terus meningkat akhirnya menjadi sebuah ajang memperkuat eksistensi masing-masing negara.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

- Beard, Charles A., 2004. *An Economic Interpretation of the Constitution of the United State*. New York: Dover Publication, Inc.
- Cimbala, Stephen J., 2005. *Nuclear Weapon and Strategy: U.S Nuclear Policy for the twenty-first century*. London: Routledge
- Cirincione, Joseph, 2007. *Bomb Scare: The History and Future of Nuclear Weapon*. New York: Columbia University Press.
- Evans, G., dan J. Newnham, 1998. *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: Penguin Books.
- Ikenberry, G. John, 2007. *American Foreign Policy Theoretical Essay*. Edisi Keempat. New York: Norton Company Inc.

Artikel Jurnal dan Jurnal Elektronik

- Levi, Michael A., dan Charles D. Ferguson, 2006. "US-India Nuclear Cooperation - a Strategy for Moving Forward", *Council on Foreign Relations*, **16**.
- Singh, B.B., 2007. "The Hyde Act 2006: India's Nuclear Dilemma", *Atoms for Peace: an International Journal*, **1** (4): 307-319. Inderscience Publishers.
- Squassoni, S., dan J. Parillo, 2006. "US-India Nuclear Cooperation: a Side-By-Side Comparison of Current Legislation", *CRS Report for Congress*, **22**.
- Sud, Hari, 2006. "India-US Nuclear Deal-the Benefits", *South Asia Analysis Group*, Paper No. 1740. [online]. dalam

<http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers18%5Cpaper1740.html> [diakses 26 Mei 2010].

Artikel Online

Carnegieendowment.org, t.t. *United States Bilateral Nuclear Cooperation*. [online]. dalam <http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=20042&prog=zgp&proj=znpp> [diakses 26 Mei 2010].

Clifton, Eli, 2007. *123 Nuclear Agreement Completed*. [online]. dalam <http://ipsnews.net/print.asp?idnews=38700> [diakses 20 Desember 2009].

Federation of American Scientist, 2002. *Strategic Security Project*. [online]. dalam <http://www.fas.org> [diakses 2 September 2009].

Krishnaswarni, S., 2006. *Indo-US N-deal a Historic Opportunity. Rediff India Abroad*. [online]. dalam <http://www.rediff.com/news/2006/mar/22nddeal.htm> [diakses 26 Mei 2010].

Raman, J. Sri, 2009. *The US-India Nuclear Deal-One Year Later*. [online]. dalam <http://www.thebulletin.org/archive/> [diakses 20 November 2009].

The Times of India, 2008. *US House Approves Indo-US Nuke Deal*. [online]. dalam http://timesofindia.indiatimes.com/US_House_approves_Indo-US_nuke_deal/articleshow/3535443.cms [diakses 24 Mei 2010].

The Acronym Institute, 2008. *Disarmament Diplomacy*. [online]. dalam <http://www.acronym.org.uk> [diakses 28 April 2010].

Situs Resmi Online

Departemen Luar Negeri Indonesia, 2009. Laporan Mingguan KBRI Islamabad.

Departemen Luar Negeri Indonesia, 2009. Laporan Mingguan ke-13 KBRI.

US Department of State Bureau of South and Central Asian Affairs, 2008. 'US-India Civil Nuclear Cooperation Initiative.' *Fact Sheet of US Department of State*. [online]. dalam www.nti.org/e_research/official_docs/dos/dos080915.pdf [diakses 26 Mei 2010].

U.S. Department of State. 2006. 'US House of Representatives Approves US- India Nuclear Deal: Majority Vote Favors Greater Civil Nuclear Cooperation'. *Bureau of International Information Programs*. [online]. dalam <http://usinfo.state.gov> [diakses 15 Desember 2009].

- _____, 2007a. *Outline of US-India Civil Nuclear Cooperation Initiative: Bilateral Agreement Offers Peaceful Nuclear Cooperation*. [online]. dalam <http://www.america.gov> [diakses 15 Desember 2009].
- _____, 2007b. *US-India Joint Statement on Completion of Civil Nuclear Negotiations: Agreement Marks a Major Step towards US-India Nuclear Cooperation*. [online]. dalam <http://www.america.gov> [diakses 15 Desember 2009].
- _____, 2008. *Statement on US-India Civil Nuclear Cooperation Initiative: Bush Approves US Agreement for Peaceful Nuclear Cooperation with India*. [online]. dalam <http://www.america.gov> [diakses 15 Desember 2009].
- _____, 2008. *Congress Approves US-India Civil Nuclear Accord: Agreement Opens Up Enhanced Trade Between United States and India*. [online]. dalam <http://www.america.gov> [diakses 15 Desember 2009].
- Senate Report 109-288. 2006. *Library of Congress – The U.S.-India Civil Nuclear Cooperation Initiative*. [online]. dalam http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/?&dbname=cp109&sid=cp1095EqIO&refer=&r_n=sr288.109&item=&sel=TOC_341138 [diakses 24 Mei 2010].

Media Massa Online

- BBC News, 2008. *Bush Signs US-India Nuclear Bill*. [online]. dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/default.stm [diakses 20 November 2009].
- Bloomberg, 2008. *Bush Wins Approval in Congress for Priority Atomic Accord*. [online]. dalam http://preview.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive_en10&sid=a7dN2SDjU0ok [diakses 24 Mei 2010].

Lain-Lain

- Cirincione, Joseph. 2006. '123 Agreement Chart: Issue in US-India Nuclear Cooperation'. *Carnegie Endowment for International Peace*.
- Koizumi, S., 2006. 'US-INDIA Nuclear Agreement Tests Japan's Proactive Diplomacy'. *Japan Chair Platform*.
- Kronstadt, Alan K. 2007. 'India-US Relations'. *CRS Report for Congress*.
- Pan, E. dan Bajoria. 2008. 'The U.S.-India Nuclear Deal'. *Council of Foreign Relation*.
- Spector, L. 2008. 'Symbolism Tops Substance in US-India Nuclear Agreement.' *Council of Foreign Relation*.

- Squassoni, S. 2005. 'U.S Nuclear Cooperation with India: Issues for Congress'. *CRS Report for Congress RL33016*.
- _____.2007. 'Issues in US-India Nuclear Cooperation.' *Proliferation Analysis*. [online]. dalam <http://www.carnegieendowment.org/files/123agreementchart.pdf> [diakses 24 Mei 2010].